

**AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PLOSOKEREP KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG**

ABSTRAKSI

Oleh :
Wahda Ilham Addina

Dosen Pembimbing:
Lina Nasihatun N, SE., M.Aks

Salah satu penyebab revitalisasi adalah tuntutan pertanggungjawaban terhadap publik. Melalui peningkatan pertanggungjawaban maka keterbukaan informasi kepada masyarakat akan semakin luas. Dimana sebagai principal, masyarakat berhak mengetahui informasi terkait kinerja instansi sektor publik untuk bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan. Kini peningkatan akuntabilitas tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Pemerintah desa juga turut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab, terutama atas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi penyelewengan dana. Karena di desa sangat sensitif dengan dana anggaran dari pemerintah. Maka diperlukan suatu pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Pada Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan pendapat responden tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Plosokerep yang bersumber dari informan Kepala Desa dan Bendahara Desa kemudian dianalisa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Plosokerep telah *accountable*. Dikarenakan seluruh kegiatan yang meliputi 5 indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah hampir mencapai 100%.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

**ACCOUNTABILITY IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT
PLOSOKEREP SUB DISTRICT SUMOBITO DISTRICT JOMBANG**

ABSTRACTION

**By:
Wahda Ilham Addina**

**Supervisor:
Lina Nasihatun N, SE., M.Aks**

One of the causes of revitalization is the demands of accountability to the public. Through increased accountability, information disclosure to the public will be wider. Where as principal, the public is entitled to know information related to the performance of public sector agencies for the evaluation and control of the management of the resources that have been mandated. Today, increased is not only done by the central government and local government alone. The village government also participates in the realization of accountable government, especially on village financial management in order to avoid misappropriation of funds. Because the village is very sensitive to budget funds from the government. Then we need an appropriate implementation and accountability. The purpose of this study is to find out how the Financial Management Accountability of Plosokerep Village, Sumobito District, Jombang Regency in 2018.

This research uses descriptive qualitative method that is describes the opinion of respondents about the management of village finances in Plosokerep Village then analyzed by Minister of Home Affairs Regulation no. 113 Year 2014 so that can be drawn a conclusion.

The results showed that based on Permendagri No. 113 Year 2014 the outline of the financial management of Plosokerep Village has been accountable. Because all of the activities covering 5 indicators have planning, implementation, administration, reporting and accountability reached almost 100%.

Keywords: Accountability, Village, Village Financial Management